

ABSTRAK

Dalam implementasinya Pemerintah Kabupaten Bandung telah memiliki masterplan Smart city, di dalamnya telah ada ketentuan indikator capaian program. Selain itu, terdapat kegiatan evaluasi Masterplan Smart City namun output dari evaluasi tersebut belum berbentuk dokumen dan hanya sebatas angka penilaian dari evaluator, sehingga belum adanya bentuk konkrit yang terukur berdasarkan indikator Smart government di Kabupaten Bandung. Hal ini jika terus dibiarkan tentu bisa berdampak buruk pada pengembangan program dari Smart government sebagai bentuk awal dari evaluasi konsep smart city agar kedepannya dapat ditentukan strategi pengembangan berdasarkan evaluasi implementasi program smart government. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Cohen (2014) yang memiliki 3 dimensi Pelayanan Online, Infrastruktur dan Open Government. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan 8 informan terpilih di Diskominfo Kabupaten Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki data yang terintegritas dari seluruh perangkat daerah yang data tersebut terkumpul dalam satu website yaitu satudata.bandungkab.go.id. Data yang terkumpul pada tahun 2024 pada dashboard tersebut bertotal 5.697 data, data tersedia 5.329, data prioritas 1.122, data non prioritas 4.364. Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan salah satu perangkat dari bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata. Diskominfo Kab. Bandung memiliki kelompok BandungKab – Computer Security Incident Response Team yang di resmikan oleh Bupati Dadang Supriatna pada tahun 2021 dan Badan Siber dan Sandi Negara, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk aplikasi pemerintah daerah Kab. Bandung. Kesimpulan yang di dapat adalah minimnya pegawai, minimnya pelatihan cyber, penggunaan layanan administrasi E – Office aplikasi layanan satu pintu Bedas Digital Service (BDS).

Kata Kunci : Smart Government, Manajemen Sumber Daya Manusia, Aplikasi